

## **EKSPLOITASI PERTANIAN MASA PENDUDUKAN JEPANG DI SURAKARTA (1942-1945)**

Penulis 1 : Lyta Endryani  
Penulis 2 : Hj. Hariantu, M.Pd  
[lyta.ambarwati@yahoo.com](mailto:lyta.ambarwati@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksploitasi pertanian yang dilakukan Jepang di Surakarta. Mengetahui besarnya permintaan dan penyerahan padi di Surakarta. Produksi pertanian yang dikuasai oleh Pemerintah Jepang menyebabkan rakyat di Surakarta menderita. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi empat langkah: *pertama*, heuristik yaitu mengumpulkan dan mencari sumber baik itu primer maupun sekunder. Sumber ini merupakan bahan utama yang menjadi bukti terjadinya suatu peristiwa. Kedua, kritik yaitu melakukan kritik ekstern yang meneliti keaslian data dari kondisi luar sumber dan kritik intern untuk meneliti kebenaran isi sumber. Ketiga, interpretasi yaitu menafsirkan, dibagi dalam dua macam yaitu analisis dan sintesis yang berarti menguraikan dan menyatukan. Keempat, historiografi yaitu penyajian penelitian dalam bentuk tulisan. Pedesaan Jawa khususnya Surakarta dengan tanahnya yang subur dan penduduknya banyak, dianggap mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Kebutuhan yang besar terhadap tersedianya bahan pangan terutama padi mengharuskan Pemerintahan Jepang mengeksploitasi secara intensif produksi pertanian dari petani. Penduduk mempunyai kewajiban untuk menanam bahan pangan dan menyerahkan kepada Pemerintah Jepang. Eksploitasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Jepang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan militer. Eksploitasi pertanian yang dilakukan oleh Pemerintahan Jepang diantaranya penyerahan padi, pengumpulan gaplek, dan penanaman wajib. Padi diserahkan melalui koperasi pertanian atau *kumiai*. *Kumiai* banyak yang melakukan kecurangan. Hasil panen yang telah diserahkan mereka curi, sehingga masyarakat harus menyerahkan hasil panennya lagi. Pengumpulan gaplek dilakukan saat musim kemarau, karena padi sulit untuk ditanam. Petani diwajibkan menyerahkan gaplek untuk dijadikan makanan pengganti beras. Penanaman jarak digunakan sebagai bahan bakar pesawat. Penduduk Surakarta yang sudah menyerahkan biji Jarak tidak dihargai dengan sejumlah uang tetapi ditukar dengan beberapa liter minyak tanah. Penurunan hasil pertanian mengakibatkan penduduk mengalami kekurangan pangan dan banyak menimbulkan kematian.

Kata kunci: Eksploitasi Pertanian, Surakarta, Pendudukan Jepang.

### ***THE AGRICULTURAL EXPLOITATION DURING THE JAPANESE OCCUPATION SURAKARTA (1942-1945)***

#### **ABSTRACT**

*This study aimed to investigate the agricultural exploitation that Japan did in Surakarta and the quantity of the demand and delivery of rice in Surakarta. The agricultural products controlled by the Japanese government made people in Surakarta suffer. The study employed the historical research method consisting of four stages. The first was heuristics, namely collecting and searching sources, both primary and secondary sources. The sources were the main materials serving as evidence of an event. The second was criticism, including external criticism to investigate the originality of the data base on the condition outside the sources and internal criticism to investigate the truth of the source contents. The third was interpretation to interpret the data, divided into two, namely analysis and synthesis to explain and combine the data. The fourth was historiography, namely the research presentation in the form of writing. Rural areas Java, especially Surakarta, with their fertile soil and dense population, were considered having high economic potentials. High demands for the availability of food stuff, especially rice, made the Japanese government intensively exploit agricultural products from farmers. People were obliged to grow food stuff plants and gave them to Japanese government. The exploitation that the Japanese government did was an effort to fulfill military needs. The agricultural exploitation that the Japanese government did included the provision of rice, collection of dried cassava, and forced*

*planting. Rice was given through agricultural cooperatives or kumiai. Kumiai did a lot of unfairness. They stole the agricultural products that they received so that people had to give their products again. The collection of dried cassava was done during the dry season because it was difficult to grow rice. Farmers were obliged to give dried cassava as substitute food for rice. Castor oil plants were grown to provide aircraft fuel. People in Surakarta who had given castor oil plants seeds did not receive money but they received several liters of kerosene. The decrease of agricultural products made people lack food and resulted in death.*

**Keywords:** *Agricultural Exploitation, Surakarta, Japanese Occupation*

## **PENDAHULUAN**

Rakyat Indonesia yang telah lama menginginkan kemerdekaan menjadi simpati terhadap Jepang dan menyambut baik kedatangan Jepang di Indonesia.<sup>[1]</sup> Pendudukan Jepang yang hanya tiga setengah tahun ini merupakan salah satu periode yang sangat menentukan bagi perjuangan bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia dipaksa bekerja dan dieksploitasi sumber daya alamnya demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan Pemerintah pendudukan Jepang. Selama menduduki Indonesia Jepang menjalankan kebijakan ekonomi berdasarkan asas ekonomi perang.<sup>[2]</sup> Ciri ekonomi perang adalah penerapan berbagai pengaturan, pembatasan, dan penguasaan produksi oleh negara untuk tujuan memenangkan perang. Ini berarti bahwa pemerintah harus menguasai semua aparat ekonomi, termasuk sektor produksi dan lalu lintas perdagangan. Praktik monopoli zaman perang dengan demikian berlangsung di seluruh sektor, baik pada tataran produksi, distribusi, maupun konsumsi.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>[3]</sup> Metode sejarah juga dapat merekonstruksi sebanyak-banyaknya peristiwa masa lampau manusia.<sup>[4]</sup> Metode penelitian sejarah kritis terdiri dari empat tahapan pokok yaitu pengumpulan data (*heuristik*), kritik sumber (*verifikasi*), penafsiran (*interpretasi*) dan penulisan sejarah (*historiografi*).

### **1. Heuristik**

Heuristik merupakan kegiatan mengumpulkan jejak masa lampau yang dikenal sebagai data sejarah. Data-data yang dikumpulkan biasanya terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber yang digunakan dalam skripsi "Eksplorasi Pertanian Masa Pendudukan Jepang di Surakarta 1942-1945" diperoleh dari berbagai perpustakaan antara lain yaitu Perpustakaan Pusat UNY, Perpustakaan Pusat UGM, St. Ignatius, Monumen Pers, dan Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran. Sumber-sumber yang diperoleh kemudian dikategorikan berdasarkan sifatnya, sebagai berikut:

#### **a. Sumber Primer**

Ada beberapa sumber primer berupa arsip yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu antara lain:

*Bendel Tanaman Jarak 1943-1945, Arsip Rekso Pustoko.*

*Bendel Pengoempoelan Gapek dan Katjang 1944-1945, Arsip Rekso Pustoko.*

*Bendel Masalah-Masalah Pembagian Pakaian, Arsip Rekso Pustoko.*

*Bendel Pengoempoelan Padi Oentoek Djepang, Arsip Rekso Pustoko.*

*Bendel Rahasia Djepang 1943-1945, Arsip Rekso Pustoko.*

*Bendel Tentang Minjak Tanah, Minjak Katjang dan Klentig, Arsip Rekso Pustoko.*

*Kejadian-Kejadian di Puro Mangkunegaran dalam Maret-April 1942*, Arsip  
Perpustakaan Mangkunegaran.

b. Sumber Sekunder

. Sumber sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:.

Aiko Kurasawa. (1993). *Mobilisasi dan Kontrol Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Grasindo.

Julianto Ibrahim. (2004). *Bandit dan pejuang di Simping Bengawan, Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*. Wonogiri: Bina Cipta Pustaka.

Nagazumi, Akira. (1988). *Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Soewidji, *Kisah Nyata Di Pinggir Jalan Slamet Riyadi di Surakarta*. Semarang: Percetakan Satya Wacana

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik sumber terdiri dari dua bagian meliputi kritik ekstern dan kritik intern.<sup>[5]</sup> Kritik ekstern biasanya digunakan para peneliti untuk melihat keaslian dari sumber yang didapat seperti kecacatan pada sebuah dokumen atau menguji otentisitas (keaslian) suatu sumber. Pada penelitian ini penulis mendapatkan sumber primer berupa arsip yang ada di Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran. Keaslian sumber masih terjaga, meskipun kadang tidak terbaca karena kertas yang sudah tua. Kritik intern dalam penulisan sejarah biasanya digunakan untuk melihat kebenaran dari sumber-sumber misalnya dokumen. Kritik internal dimaksudkan untuk menguji kredibilitas dan realibilitas suatu sumber.<sup>[6]</sup> Kecocokan isi yang sesuai dengan jaman pembuatannya dapat dibuktikan dengan kritik intern.

3. Interpretasi (penafsiran)

Interpretasi dapat diartikan sebagai penafsiran. Dalam prosesnya interpretasi terdiri dari analisis dan sintesis, kedua proses tersebut harus selalu memikirkan unsur-unsur yang relevan pada dokumen. Analisis data dilakukan setelah beberapa data yang diperoleh telah melalui uji kelayakan.<sup>[7]</sup> Beberapa data yang telah melalui uji kelayakan tersebut dapat dianalisis, karena data yang telah diperoleh tidak akan dapat bermakna atau “berbunyi” jika tidak dilakukan interpretasi. Kemudian dilanjutkan pada proses sintesis dari data-data yang didapat digabungkan sehingga menghasilkan suatu pendapat yang saling berhubungan dan sesuai dengan fakta yang ada.

4. Historiografi

Secara umum historiografi atau penulisan sejarah dapat diartikan sebagai penyajian hasil sintesis yang diperoleh dalam bentuk kisah sejarah. Maka dari itu salah satu bagian yang paling penting dalam penyusunan data sejarah ini adalah penyusunan secara kronologis yakni dalam periode-periode waktu, karena kronologi merupakan satu-satunya norma obyektif dan konstan yang harus diperhitungkan.<sup>[8]</sup> Sehingga hasil penelitiannya dapat diwujudkan dalam bentuk tertulis serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara ilmiah dalam kacamata penelitian historis.

#### **GAMBARAN UMUM WILAYAH SURAKARTA TAHUN 1942-1945**

Pada tanggal 5 Maret 1942 kekuatan pasukan Jepang mulai menduduki daerah pedalaman Jawa termasuk Surakarta.<sup>[9]</sup> Kekuatan pasukan Jepang yang menyerang dan menduduki Surakarta dipimpin oleh komandan Funabiki. Kehadiran pasukan ini dihadap oleh dua kompi pasukan KNIL, satu peleton kavaleri, dua batalyon Legiun

Mangkunegaran, satu batalyon Reserve Corps dan ditambah dengan beberapa pasukan milisi. Pasukan penghadang ini tidak mampu menghambat gerak maju pasukan Jepang, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama militer Jepang berhasil menguasai kota Surakarta.<sup>[10]</sup> Para tokoh masyarakat maupun kepala-kepala desa digunakan juga untuk menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan Jepang dalam mensukseskan Perang Asia Timur Raya. Mereka dipaksa untuk menyediakan keperluan perang, yaitu pemaksaan penyerahan padi, penyerahan gaplek, penanaman biji jarak, biji kapas dan Rosela.

Karesidenan Surakarta dibagi menjadi dua wilayah yang hampir sama besarnya yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Wilayah Kasunanan terdiri atas 4 *ken* (kabupaten), 18 *gun* (kawedanan) dan 66 *son* (*onderdistrict*), sedangkan Mangkunegaran memiliki 2 *ken*, 9 *gun* dan 41 *son*. Wilayah yang masuk dalam Solo *Kochi* adalah Kota Surakarta, Sragen, Klaten dan Boyolali. Wilayah Mangkunegaran meliputi Kota Mangkunegaran dan Wonogiri *Ken*.

#### **PRAKTEK-PRAKTEK EKSPLOITASI PERTANIAN DI SURAKARTA MASA PENDUDUKAN JEPANG 1942-1945**

Tujuan pemerintah militer Jepang menduduki Indonesia adalah untuk mendapatkan bahan baku guna memenuhi kebutuhan perang. Sasaran utama dari eksploitasi di Indonesia adalah hasil-hasil pertanian dan tenaga kerja. Pedesaan Jawa dengan tanahnya yang subur dan penduduknya yang banyak, dianggap mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa. Kebutuhan yang begitu besar terhadap tersedianya bahan pangan terutama padi mengharuskan pemerintah Jepang mengeksploitasi secara intensif produksi padi dari petani. Eksploitasi tersebut berupa kebijaksanaan yang mengharuskan petani atau setiap orang yang menghasilkan padi atau bahan pangan lainnya untuk menyerahkan hasil produksinya tersebut kepada pemerintah militer Jepang. Kebijakan ini baru dimulai pada bulan Agustus 1942 atas inisiatif *Gunseikanbu*.<sup>[11]</sup> Sejak dimulainya rencana pengumpulan padi sampai April 1943, rencana pengumpulan belum berjalan secara efektif karena terjadi banyak perbaikan-perbaikan kebijaksanaan dan munculnya peraturan-peraturan baru mengenai padi. Baru pada bulan April 1943 sampai berakhirnya pemerintahan Jepang merupakan masa intensif pengumpulan padi dari petani. Beberapa peraturan yang muncul untuk mendukung kebijaksanaan penyerahan padi adalah penetapan kuota padi, penetapan harga gabah dan beras, dan dibentuknya Badan Pengelolaan Pangan atau *Shokuryo Kanri Zimusyo* yang mengurus penyerahan padi di Surakarta tidak hanya dikelola oleh *Zyuuyoo Bussi Kodan* tetapi diawasi pula oleh *Kooti Soomutyookan*. Padi yang diserahkan oleh petani kepada *Zyuuyoo Bussi Kodan* dan *Kooti Soomutyookan* lewat para pejabat lokal tersebut dibayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Harga padi ditentukan dengan nilai uang yang sangat rendah dan dibayar dengan uang kertas yang seenaknya sendiri dicetak oleh pemerintah Jepang. Belum lagi upaya-upaya penggunaan atau korupsi yang dilakukan oleh para pejabat lokal sebelum uang tersebut diserahkan kepada para petani.

Seiring dengan semakin menurunnya produksi bahan makanan terutama padi, maka gaplek dianggap sebagai alternatif terbaik untuk menutupi kekurangan tersebut. *Mitsui Bussan Kabushiki Khaisa* dan Mangkunegaran *Kooti Soomutyookan* memperkirakan panen gaplek di Wonogiri *Ken* pada tahun 1944 sebesar 100 ribu ton di atas tanah seluas 50 ribu hektar. Dari produksi gaplek sebanyak itu, penduduk Wonogiri berhak

mendapat 76.750 ton untuk makan selama setahun, 13.250 ton untuk disimpan sebagai cadangan masa paceklik dan 10.000 ton diserahkan kepada pemerintah Jepang.<sup>[12]</sup> Bencana kekeringan dan pengumpulan gaplek secara paksa telah menyebabkan terjadinya kekurangan pangan di Wonogiri. Kondisi ini mencapai puncaknya pada bulan September dan Oktober 1944.

Penduduk Wonogiri yang kekurangan pangan akhirnya makan seadanya seperti bonggol pisang dan bonggol sente yang gatal. Walaupun kondisi semacam ini diderita pula oleh penduduk daerah lain seperti Boyolali, Klaten, dan lain-lain tetapi Wonogiri mengalami nasib yang lebih parah. Penyakit busung lapar dan angka kematian meningkat dengan pesat terutama daerah Slogohimo, Purwantoro dan Jatipurno.<sup>[13]</sup> Sementara itu, penduduk tidak mampu membeli bahan makanan terutama gaplek karena harganya telah meningkat dari Rp.2 menjadi Rp.20 per kwintal.<sup>[14]</sup> Untuk mengatasi hal ini, Wonogiri Kencho mengusulkan kepada Kooti Soomutyookan agar bersedia membagi-bagikan gaplek yang telah disimpan di gudang sebanyak 449.225 kilogram.<sup>[15]</sup> Walaupun usul tersebut diterima, tetapi tidak banyak membantu mengurangi penderitaan penduduk yang sudah parah. Selain penanaman padi dan singkong, Jepang juga mewajibkan menanam jarak. Tanaman ini mengandung biji yang bisa menghasilkan minyak yang berguna untuk bahan bakar pesawat terbang, menghaluskan kulit, obat sabun dan untuk membersihkan perut. Setiap 7.500 biji Jarak bisa menghasilkan minyak yang dapat dipakai untuk menerbangkan pesawat terbang selama 1 jam. Apabila rata-rata 1 pohon Jarak menghasilkan 500 biji, maka 15 pohon Jarak sudah cukup untuk menerbangkan pesawat Jepang selama 1 jam.<sup>[16]</sup> Pengelolaan penanaman kapas dan serat rami tidak terlepas juga dari kecurangan dan tekanan-tekanan. Penanaman kapas di Surakarta kurang begitu digalakkan dibandingkan penanaman Jarak. Tanaman kapas dapat tumbuh dengan subur di daerah yang memiliki curah hujan yang cukup yaitu kira-kira 1,500 mm sampai 3 mm. Tanaman tersebut ditanam pada musim penghujan dan dipanen pada saat kemarau. Meskipun penanaman kapas yang baik adalah bulan Pebruari, tetapi penanaman tersebut baru dapat dilaksanakan pada bulan April untuk menunggu padi usai dituai.<sup>[17]</sup>

#### **DAMPAK EKSPLOITASI PERTANIAN YANG DILAKUKAN JEPANG DI SURAKARTA**

Tentara Jepang masuk ke Indonesia pada musim penghujan dimulai. Para petani masih memiliki kebebasan untuk menyisihkan produksi mereka. Orang Jepang membeli beras yang dibutuhkan melalui Rijst Verkop Central (Pusat Pembelian Beras) yang kemudian namanya berubah menjadi *Beikoku Tosei Kai* (BTK, Persatuan Kontrol Beras).<sup>[18]</sup> Pada bulan Agustus 1942, lima bulan setelah melakukan penyerbuan, pemerintah bentukan Jepang (*Gunseikanbu*) mengambil langkah pertama yaitu melaksanakan pengaturan bahan pangan secara sistematis. Pemerintah membentuk sebuah badan pengelola bahan pangan yang disebut dengan *Shokuryo Kanri Zimusho* (SKZ) yaitu Kantor Pengelolaan Makanan. Badan ini berdiri dibawah Departemen Ekonomi *Gunseikanbu*. *Shokuryo Kanri Zimusho* bertanggung jawab terhadap proses pembelian dan penyaluran padi di bawah monopoli serta menentukan jumlah padi yang akan dibeli pemerintah Jepang. *Shokuryo Kanri Zimusho* juga bertanggung jawab menentukan harga resmi padi dan membuat rencana penyaluran padi untuk penduduk perkotaan.<sup>[19]</sup>

Badan Jepang yang mengurus penanaman kapas adalah *Menka Saiba Kyokai* dan dikelola oleh perusahaan Jepang bernama *Tozan Noji*. Keterlibatan *Tozan Noji* ini

dihubungkan dengan distribusi bahan sandang kepada penduduk.<sup>[20]</sup> Sebagai perusahaan yang berorientasi profit, maka distribusi bahan pakaian kepada penduduk diupayakan untuk tidak merugikan perusahaan. Oleh karena itu, bahan pakaian yang dibagikan tidak mencukupi jumlah kebutuhan penduduk. Selain itu, panitia yang terlibat langsung dalam pembagian bahan pakaian adalah wedana, kepala desa dengan perangkatnya melakukan banyak kecurangan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa, banyak kepala desa dengan perangkat-perangkatnya melakukan berbagai penyimpangan dalam pembagian bahan pakaian seperti upaya penimbunan dan menjual bahan tersebut ke pasar gelap.<sup>[21]</sup> Hal tersebut menyebabkan rakyat mulai tidak percaya pada kepala desa, wedana dan struktur pemerintah lainnya.

Kebijaksanaan penyerahan padi dan palawija telah menyulitkan masyarakat di Surakarta untuk memenuhi kebutuhan makan tiap harinya. Implikasi dari kebijaksanaan ini adalah kekurangan pangan yang dialami oleh sebagian besar penduduk Surakarta. Kondisi kekurangan pangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kebijaksanaan penyerahan bahan makanan tetapi disebabkan pula menurunnya hampir semua produksi bahan makanan di seluruh Jawa dan Madura.

Para petani yang bersedia menjadi *romusha* ke luar Jawa atau luar negeri dilatarbelakangi oleh kondisi kehidupan yang memprihatinkan. Daerah Surakarta yang menjadi pemasok romusha paling banyak adalah Klaten, Boyolali, dan Wonogiri. Mereka mengerjakan perbaikan jembatan, pembuatan goa, parit atau membersihkan pabrik atau gudang. Seringkali mereka diperintah pula untuk mengangkut padi atau palawija dari desa menuju gudang kerajaan (*petuton*).<sup>[22]</sup> Makanan yang diperoleh kadang-kadang nasi tetapi lebih sering bubur gaplek dengan lauk ikan asin. Persediaan makanan yang tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan menyebabkan banyak *romusha* yang jatuh sakit. Kondisi yang memprihatinkan ini menyebabkan berkembangnya perasaan tidak suka pada *romusha* terhadap Jepang.

#### **KESIMPULAN**

Sasaran utama dari eksploitasi di Indonesia terutama di Surakarta adalah hasil-hasil pertanian dan tenaga kerja. Pedesaan Jawa dengan tanahnya yang subur dan penduduknya yang banyak, dianggap mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Kebutuhan yang besar terhadap tersedianya bahan pangan terutama padi mengharuskan pemerintahan Jepang mengeksploitasi secara intensif produksi padi dari petani. Eksploitasi tersebut berupa kebijaksanaan yang mengharuskan petani menghasilkan padi atau bahan pangan lainnya untuk menyerahkan hasil produksinya kepada pemerintah militer Jepang. Praktek-praktek eksploitasi yang dilakukan pemerintah Jepang antara lain pengumpulan padi, pengumpulan gaplek dan penanaman wajib. Tanaman wajib yang harus ditanam yaitu jarak dan kapas. Biji jarak digunakan pemerintah Jepang sebagai pelicin senjata yang digunakan untuk perang. Eksploitasi pertanian yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang di Surakarta berdampak terhadap kondisi masyarakat di Surakarta, serta bagi Jepang sendiri. Pemaksaan pengumpulan padi yang melebihi target menyebabkan masyarakat mulai mengkonsumsi makanan yang kurang lazim dimakan sehari-hari. Selain itu, muncul koperasi-koperasi bentukan Jepang yang sering disebut kumiai.

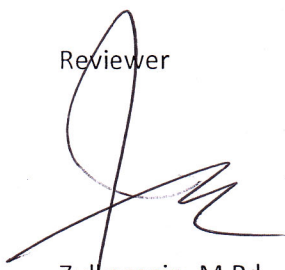
#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Nugroho Notosusanto. (1979). *Tentara PETA pada Jaman Pendudukan Jepang*. Jakarta: Gramedia.

- [2] Amrin Imran, dkk. (2009). *Indonesia dalam Arus Sejarah*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- [3] Louis Gottschalk. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- [4] Nugroho Notosusanto. (1984). *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*. Jakarta: Mega Book Store.
- [5] Nugroho Notosusanto. (1984). *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*. Jakarta: Mega Book Store.
- [6] Daliman. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- [7] Louis Gottschalk. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- [8] Louis Gottschalk. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- [9] Julianto Ibrahim. (2004). *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan*. Wonogiri: Bina Citra Pustaka.
- [10] Pasukan “penghadang” bentukan Belanda banyak yang tertangkap dan sebagian lainnya bersembunyi. Senjata api maupun senjata tajam dirampas oleh pasukan Jepang termasuk senjata-senjata yang berserakan di beberapa jalan yang menjadi pusat pertempuran seperti: Jalan Tirtonadi, Balapan dan Gilingan.
- [11] Staf pemerintahan militer pusat pada jaman Jepang.
- [12] Mangkunegaran Kooti Soomutyokan kepada Mitsui Bussan Kabushiki Kaisha, tgl. 10 Gogatsu 2604 (10 Mei 1944), dalam “Bendel Pengoempoelan Gaplek dan Katjang 1944-1945”, *Arsip Reksa Pustaka*.
- [13] Wonogiri Kencho kepada Toean Kooti Soomutyokan 19 Juni-gatsu 2604 (19 Desember 1944) dalam “Bendel Pengoempoelan Gaplek dan Katjang 1944-1945” *Arsip Reksa Pustaka*.
- [14] Sarwoko Mangoenkoesoemo kepada Toean Soerakarta Kooti Zimu Kyoku Tyookan, 30 hajigatsu 2604 (30 Agustus 1944) dalam “Bendel Pengoempoelan Gaplek dan Katjang 1944-1945” *Arsip Reksa Pustaka*.
- [15] Wonogiri Kencho kepada Toean Kooti Soomutyokan 19 Juni-gatsu 2604 (19 Desember 1944) dalam “Bendel Pengoempoelan Gaplek dan Katjang 1944-1945” *Arsip Reksa Pustaka*.
- [16] Mangga Kita Nanem Djarak, Wonten ing Kebon Oetawi Pekawisan: Kita Baktekaken Kagem Garoeda Angkasa”, Selebaran Jepang yang dikeluarkan oleh *Sendebu*, tahun 2602.

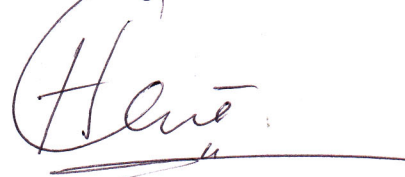
- [17] Aiko Kurasawa. (1993). *Mobilisasi dan Kontrol: Study tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Gramedia.
- [18] RVC didirikan di Jawa pada tahun 1941. Ada tiga pusat, yaitu: Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Lembaga ini sejenis dengan Persatuan Penggilingan Padi yang didirikan untuk melayani pembelian padi untuk pemerintah.
- [19] Akira Nagazumi. (1988). *Pemberontakan Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [20] Akira Nagazumi. (1988). *Pemberontakan Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [21] Arsip Masalah-Masalah Pembagian Pakaian, *Arsip Rekso Pustoko*.
- [22] Tentang Petoeton dalam *Arsip Rekso Pustaka*.

Reviewer



Zulkarnain, M.Pd  
NIP. 19740809 200812 1 001

Yogyakarta, 17 November 2015  
Menyetujui,  
Pembimbing



Hj. Harianti, M.Pd  
NIP. 19501210 197903 2 001